



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUSANTO**
2. Jabatan : **INSPEKTUR I**
3. NHK : **109844**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.922.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 449 m2/300 m2 di KOTA DEPOK ,  
WARISAN Rp. 1.752.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KOTA DEPOK , WARISAN Rp.  
155.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/70 m2 di BOGOR, HASIL  
SENDIRI Rp. 525.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di BOGOR, HASIL  
SENDIRI Rp. 320.000.000
5. Tanah Seluas 237 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp.  
170.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 190.000.000

1. MOBIL, HONDA CITY SEDAN Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp.  
50.000.000
2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI  
Rp. 125.000.000
3. MOTOR, PIAGGIO SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI  
Rp. 15.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 20.000.000

**D. SURAT BERTAHAGA**

Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 149.200.000

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ---

**Sub Total**

Rp. 3.281.200.000

**III. HUTANG**

Rp. 15.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.266.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.